



KONDISI | Hujan yang sering mengakibatkan meluapnya Sungai Manggoi sehingga runtuhnya tebing kiri-kanan. (agus suryadi)

Air Meluap, Sungai Manggoi Terban

SUNGAI SARIK - SINGGALANG

Sungai Batang Manggoi meluap. Akibatnya tanah di bibir sungai itu terban. Sedikitnya 2 rumah, 1 tempat ibadah dan 1 pesantren sudah semakin dekat dengan bibir Sungai Manggoi tersebut.

Babinsa Koramil 03/SS Kodim 0308/Pariaman Koptu Aprisal bersama Walinagari

Afrizal dan Bamus sudah turun dan mengecek langsung ke lokasi tersebut, Senin (3/6).

Ditempat terpisah Danramil 03/Sungai Sariak, Kapten Arm Azral Koto menjelaskan, bahwa longsor bibir sungai atau abrasi tersebut, diakibatkan hujan deras mengguyur sejak Sabtu (1/6). Beruntung tak ada korban jiwa pada peristiwa itu.

"Namun, bibir Sungai Batang Manggoi di lokasi tersebut yang jatuh ke sungai menimbulkan cerukan tanah di ping-

gir sungai," ungkapnya.

Untuk antisipasi terjadi hal yang tidak diharapkan diberi pembatas dengan menggunakan bambu di sekitar lokasi longsor tersebut. Begitupun kepada warga agar waspada dan berhati-hati.

"Rencananya, kita bersama aparat nagari setempat dan warga sekitar akan melaksanakan kerja bakti atau gotongroyong untuk memperbaiki abrasi tersebut," tuturnya. Sementara itu, Walinagari

Afrizal segera melakukan upaya antisipasi berupa pemasangan bronjong atau pengedaman di sisi sungai maka bangunan yg sudah dekat dengan bibir sungai yang terancam ambruk itu.

"Kami berharap ada bantuan dari pemerintah untuk mengantisipasi persoalan ini. Namun, untuk sementara, kita akan memperbaikinya dengan alat seadanya. Sehingga, abrasi ini tidak semakin meluas," tuturnya. (503)

Pemko Bukittinggi Terapkan Pelajaran Muatan Lokal

Bukittinggi, Singgalang

Pemerintah Kota Bukittinggi tahun pelajaran 2024-2025 nanti kembali menerapkan pelajaran muatan lokal bagi pelajar SD dan SMP Negeri. Penerapan lima pelajaran muatan lokal tersebut yakni Budaya Adat Minang Kabau (BAM), Aqidah Akhlaq, Fiqih, Bahasa Arab dan Sejarah Islam.

Untuk memberikan materi muatan lokal itu, khususnya Budaya Adat Minang Kabau (BAM), Pemko Bukittinggi berkolaborasi dengan ninik mamak, tokoh adat dan bundo kanduang. Para tokoh adat ini hadir ke sekolah menyampaikan materi tentang adat Minangkabau, khususnya Adat Salingka Nagari seperti Kato Nan Ampek, Sumbang Dua Baleh dan Panitahan.

Walikota Erman Safar menyampaikan tahun pelajaran 2024-2025 ini Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menerapkan lima pelajaran muatan lokal bagi pelajar SD dan SMP



BUNDO Kandang sedang mengajarkan adat makan bajamba di Nagari Kurai Bukittinggi. (almujafri surau)

Negeri Bukittinggi. Kelima pelajaran muatan lokal itu diberikan untuk membekali generasi muda dengan kekuatan iman dan yang dibalut dengan adat budaya Minangkabau selaras dengan ajaran Islam.

"Insya Allah tahun pelajaran 2024-2025 penambahan lima pelajaran muatan lokal bagi

murid SD dan SMP Negeri, tetap kita berikan. Kita juga tengah upayakan bagaimana seluruh sekolah swasta di Bukittinggi juga menerapkan pelajaran muatan lokal ini karena memberikan dampak baik kepada siswa," ujarnya. "Semoga usaha ini dapat berjalan lancar sehingga kota Bukittinggi satu-

satunya daerah di Sumatera Barat yang menerapkan pelajaran muatan lokal di SD dan SMP Negeri dan swasta," sambungnya.

Pemko Bukittinggi telah mulai menerapkan lima pelajaran muatan lokal ini sejak tahun pelajaran 2021-2022. Program inisiatif Walikota Erman Safar mendapat nilai positif dari masyarakat karena itu tetap dilanjutkan. Di mana ada kekurangan atau kendala yang dihadapi akan terus dievaluasi dan dicarikan solusinya.

Penambahan lima pelajaran muatan lokal ini, pada prinsipnya membekali generasi muda dengan adat dan agama, sekaligus melestarikan kearifan lokal sehingga anak-anak tidak terjerabut dari akar budayanya sendiri. Pengetahuan tentang adat dan agama ini juga membentengi mereka dari segala pengaruh kemajuan teknologi dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik. (as)

Sumbar Mesti Terus Lahirkan Pemimpin Berjiwa Negerawan

BUKITTINGGI- Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tercatat banyak tokoh pemimpin berjiwa negarawan yang berasal dari Ranah Minang. Mereka merupakan para pemimpin yang tidak mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan, Ketua DPRD Sumbar, Supardi ketika memberikan sambutan pada acara Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia dan peluncuran Buku Biografi Maspar Rasyid, Minggu (2/6) di Bukittinggi.

Hingga saat ini, kata Supardi, dari Sumbar tetap lahir tokoh yang berjiwa negarawan. Ia mencontohkan, Maspar Rasyid sebagai salah satu tokoh tersebut.

"Beliau merupakan tokoh yang pemikiran-pemikirannya perlu menjadi panutan bagi generasi ke generasi," ujarnya.

Ia mengatakan walaupun Maspar Rasyid tidak pernah menjadi kepala daerah atau menduduki jabatan lainnya, namun sumbangsahnya dalam kebangkitan pelajar Islam Indonesia amat besar. Ia telah



Supardi

memberikan pemikiran-pemikiran yang patut jadi panutan semua orang. Pemikiran pemikiran tersebut amat berguna untuk kemajuan bangsa dan negara.

Namun, Supardi menilai dalam beberapa dekade terakhir semakin sedikit muncul tokoh-tokoh negarawan dari Sumbar. Bahkan muncul seolah keengganan untuk memperlihatkan diri sebagai putra Minang.

"Hal ini dapat kita cermati sebagai dampak peristiwa PRRI. Saat itu banyak masyarakat mengganti nama anak dengan nama-nama khas Jawa karena rasa malu dan takut cemas akan masa depan anak nantinya, salah satunya tidak mendapatkan pekerjaan. Termasuk nama saya, Supardi.

Nama ini memunculkan anggapan saya orang Jawa, padahal saya putra Minang tulen," ungkapnya.

Kata Supardi, sejarah kekuasaan orde lama dan orde baru serta reformasi amat berpengaruh pada tumbuhnya tokoh-tokoh pemimpin yang berjiwa negarawan dari Sumatera Barat.

Supardi menceritakan, ia pernah menjadi aktivis buruh. Saat itu ia bergabung dalam organisasi buruh pimpinan Mochtar Pakpahan yang merupakan tokoh gerakan buruh Indonesia sekaligus pendiri serikat buruh independen pertama di Indonesia.

"Sebagai aktivis buruh, saya sempat ikut melakukan demo. Salah satu puncak aksi demo itu di Medan. Begitulah upaya organisasi memperjuangkan hak masyarakat. Bahkan kami dicari dan dikejar-kejar aparat dalam perjuangan kala itu. Namun saat ini organisasi buruh tidak diakui pemerintah pusat," paparnya.

Supardi menilai, lahirnya pemimpin negarawan itu tidak serta merta karena menjabat ataupun tumbuh dari kalangan

yang berkuasa. Akan tetapi mereka tumbuh besar dalam gerakan dan memiliki pemikiran yang mendahulukan kepentingan rakyat, daerah dan negara.

"Kita berharap akan terus lahir dan tumbuh disetiap generasi pemimpin-pemimpin yang berjiwa negarawan dari ranah minang Sumbar ini kedepannya," ujarnya.

Ia menilai kelahiran pemimpin yang berjiwa negarawan ditandai dengan prestasi kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

"Semoga Sumbar dan kabupaten kota terus maju dengan pemimpinnya yang selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat," doa Supardi.

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius, Ketua Pengurus Yarsi Sumbar Zainul Daulay, Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Besar PII Harmazaldi, Ketua Umum PW PII Sumbar serta ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan peserta Pelajar Islam Indonesia. (401)

HARI LINGKUNGAN HIDUP

PLN IP UPB Bukittinggi Tanam 1000 Pohon di Simarasok Baso

AGAM - alam rangka hari lingkungan hidup sedunia, PLN PLN Indonesia Power UPB Bukittinggi Sumatera Barat melakukan penanaman 1000 pohon dan aksi bersih Sungai Batang Agam di Desa Wisata Simarasok Kecamatan Baso, Senin (3/6)

Budi Marianto Manager PLN IP UPB Bukittinggi pada penyerahan bibit tanaman buah-buahan di Kantor Wali Nagari Simarasok Kecamatan Baso menjelaskan, dengan adanya penanaman 1000 pohon bibit tanaman dan aksi bersih di Sungai Batang Agam yang bekerjasama dengan Pemerintah Nagari Simarasok melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Simarasok diharapkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Agam dapat terawat.

Apalagi aliran sungai Batang Agam juga dimanfaatkan sebagai wisata arung jeram yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Simarasok Kecamatan Baso, tentunya lingkungan aliran sungai Batang Agam itu dapat dijaga dengan baik dari pencemaran sampah.

Selaku Manager PLN IP UPB Bukittinggi sangat mengapresiasi Pokdarwis Desa Wisata Simarasok Kec. Baso yang telah turut serta menjaga alur sungai Batang Agam dari pencemaran sampah, sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah ke aliran Batang Agam, ujar Budi Marianto Manager PLN IP UPB Bukittinggi.

Wali Nagari Simarasok Muhammad Nurzen saat menerima bantuan bibit tanaman buah-buahan tersebut, mengucapkan terima kasih kepada Manager PLN IP UPB Bukittinggi, karena bibit tanaman buah-buahan ini ditanam oleh anggota Pokdarwis pada kiri kanan alur sungai Batang Agam, kemudian ada juga ditanam oleh masyarakat yang berladang atau bermukim tidak berapa jauh dari aliran sungai Batang Agam.

Dijelaskan, bantuan bibit tanaman jenis buah-buahan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menghimbau kepada masyarakat yang menerima bibit tanaman tersebut agar dapat ditanam serta dirawat dengan baik, harap Muhammad Nurzen.

Ketua Pokdarwis Desa Wisata Simarasok Kecamatan Baso, Ifnaldi usai penyerahan menjelaskan, dari sejumlah bibit yang diterima sudah ditanam dipinggir sungai Batang Agam, karena sebelum bibit datang sudah dipersiapkan lubang menanam.

Sedangkan penanaman perdana dilakukan Manager PLN IP UPB Bukittinggi, Budi Marianto, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dasril, M.St, Wali Nagari Simarasok, Muhammad Nurzen, Bhabin Kamtibmas Nagari Simarasok dan unsur lembaga nagari Simarasok. (511)



SERAHKAN BIBIT - Budi Marianto Manager PLN IP UPB Bukittinggi menyerahkan bibit tanaman kepada Wali Nagari Simarasok, Muhammad Nurzen, Senin (3/6) dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. (kasnadi.np)

Baznas Padang Salurkan Bantuan

LUBUK BASUNG- Baznas Kota Padang menyalurkan bantuan dari para muzakki kepada korban bencana banjir lahar dingin yang melanda Kabupaten Agam.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua III Baznas Kota Padang, M Mufti Syarfie, yang didampingi oleh Ketua Baznas Agam, Isman Imran, Senin (3/6).

Bantuan diterima oleh Perwira Piket Posko Bencana, Kadis Perhubungan, Andrinaldi, di Posko Bencana di Kantor Camat Sungai Pua.

M Mufti Syarfie menyampaikan bahwa Baznas Agam menunaikan amanah dari para muzakki yang telah memberikan zakatnya. Bantuan tersebut disampaikan kepada Posko Bencana untuk kemudian diteruskan kepada para korban bencana. "Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban bencana. Ini adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita bersama," katanya.

Perwira Piket, Andrinaldi, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diserahkan. (210)



BAZNAS - Wakil Ketua III Baznas Kota Padang, M Mufti Syarfie, didampingi oleh Ketua Baznas Agam, Isman Imran menyalurkan bantuan dari para muzakki untuk korban bencana banjir lahar dingin yang melanda Kabupaten Agam, Senin (3/6). (ist)

Pelaku Pelecehan Ditangkap

PADANG - Seorang pemuda di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terpaksa berurusan dengan polisi.

Pemuda yang diketahui berinisial AP (21) warga Kampung Muara Air Haji, Pasar Lama Muara Air Haji, dilaporkan karena dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pelajar. "Benar, pelaku kami amankan di rumahnya tanpa ada perlawanan pada Jumat 31 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib," ungkap Kapolsek Linggo Sari Baganti, AKP Welly Anoftri kemarin.

Ia menjelaskan, usai tangkap jajarannya, pelaku AP sempat enggan mengakui perbuatannya. Namun, setelah diinterogasi lebih lanjut oleh petugas, AP akhirnya mengakui perbuatan bejat tersebut.

Ia mengaku melakukan perbuatan bejatnya terhadap pelajar 17 tahun itu setelah saling sama kenal dan berteman. "Berdasarkan laporan keluarga korban pada Sabtu 18 Mei 2024, perbuatan ini dilakukan pelaku pada Senin (13/5) sekira pukul 13.00.

Berdasarkan laporan itu (pelaku melakukan perbuatannya) di Pantai Kito Kampung Muara Air Haji Ken. Pasar Lama Muara Air Haji," terangnya.

Lanjutnya, usai ditangkap saat itu, AP dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Linggo Sari Baganti.

Ia mengatakan, pelaku diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 81. "Pelaku dan barang bukti sudah kami amankan di Polsek Linggo Sari Baganti. Kami menghimbau kepada orang tua dan anak remaja agar selalu waspada akan kejahatan terhadap anak. Jangan sampai orang lain melakukan perbuatan yang tidak baik akan berdampak buruk pada masa depannya," ujarnya. (108)



Selasa, 4 Juni 2024
(27 Zulkaidah 1445 H)

SUPARDI
KETUA DPRD SUMBAR

IRSYAD SAFAR
WAKIL KETUA DPRD SUMBAR

SUWIRPEN SUIB
WAKIL KETUA DPRD SUMBAR

INDRA D. RAJU LELO
WAKIL KETUA DPRD SUMBAR

RAFELIS
SEKRETARIS DPRD SUMBAR

DPRD Sumbar Tetapkan Subtansi Ranperda RTRW Tahun 2023-2043

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan subtansi rancangan peraturan perda (ranperda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) Sumbar Tahun 2023-2043. Penetapan dilaksanakan saat rapat paripurna DPRD bersama gubernur, Senin (3/6) di gedung DPRD setempat.



Ketua panitia khusus (pansus) pembahasan ranperda tersebut, Zulkenedi Said mengatakan tahapan pembahasan subtansi RTRW telah dilaksanakan dalam beberapa langkah. Diantaranya, pansus telah melakukan berbagai agenda pembahasan, baik itu rapat internal, rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder terkait.

Selain juga telah melaksanakan konsultasi dengan kemdagri dan Kementerian ATR dan melakukan studi perbandingan ke daerah Jawa Barat (Jabar) dan Bali.

"Pada konsultasi ke kementerian, semua masukan saran dan perbaikan-perbaikan yang disampaikan kementerian telah kami lakukan. Seperti perbaikan pada draf rencana ranperda subtansi. Perbaikan juga telah dibahas pansus bersama OPD," ujarnya.

Selain itu pansus telah melakukan dan menindaklanjuti semua laporan dan masukan saat rapat kerja.

"Hal-hal yang menjadi catatan penting dalam subtansi ranperda ini sudah diperbaiki dan disempurnakan," ujarnya.

Zulkenedi memaparkan, ada

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam subtansi ranperda RTRW. Beberapa poin bahkan telah sempat menjadi perdebatan panjang dalam berbagai rapat pembahasan.

Poin-poin tersebut diantaranya tentang batas-batas wilayah. Kemudian tentang proyek strategis nasional dan proyek strategis provinsi. Lalu tentang pemanfaatan potensi ekonomi sepanjang pantai.

Tak kalah penting tentang bagaimana RTRW dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin terakhir yakni tentang apapun bentuk RTRW nantinya, potensi lokal daerah tidak dimarjinalkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan sesuai dengan tahapan penetapan ranperda RTRW yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021, gubernur telah menyampaikan pada DPRD ranperda tentang ranperda tahun 2023 2043 untuk dibahas dan mendapatkan kesepakatan bersama terhadap subtansi ranperda RTRW yang akan menjadi dasar untuk



mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait.

"Subtansi RTRW adalah inti utama a dari ranperda RTRW yang akan diminta persetujuan kementerian. Maka pansus telah melakukan pembahasan secara komprehensif dengan memperhatikan subtansi RTRW nasional," ujar Supardi. Ia mengatakan, RTRW merupakan tata dan dukungan lainnya serta karakteristik daerah. Sehingga pembahasannya memakan waktu cukup lama bahkan melebihi ketentuan alokasi waktu yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021.

Dari pembahasan secara komprehensif tersebut pansus telah berhasil menetapkan tiga subtansi pokok dan beberapa catatan lain terkait subtansi yang akan dituangkan dalam ranperda RTRW Sumbar. Sehingga kemudian bisa diminta persetujuan pada kementerian terkait.

Disamping, lanjut Supardi, diharapkan pula OPD terkait segera melengkapi bahan sesuai dengan notulen rapat yang disampaikan kementerian ATR BPN pada Kepala Dinas BM-CKTR pada tahun 2022 tentang penyampaian notulensi RTRW Sumbar.

Supardi memaparkan, sesuai dengan tahapan pembahasan ranperda, yakni pembahasan tingkat pertama, fraksi-fraksi DPRD Sumbar telah menyampaikan pendapat akhir terhadap subtansi RTRW, pada prinsipnya fraksi-fraksi dapat menyetujui sebanyak 13 subtansi dari pembahasan yang dilaksanakan pansus.

Selain itu, fraksi-fraksi juga memberikan beberapa masukan dan catatan yang menjadi

waktu karena membutuhkan pembahasan komprehensif.

Subtansi RTRW ini akan segera disampaikan pada kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Kesepakatan subtansi bersama DPRD merupakan salah satu syarat dalam penetapan RTRW daerah.

"Tahapan terakhir dalam penetapan RTRW adalah evaluasi RTRW oleh kementerian dalam negeri," ujarnya.

Mahyeldi mengatakan sesuai aturan pemerintah pusat, penetapan ranperda RTRW mesti dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah penetapan subtansi.

Jika dalam waktu 2 bulan belum ditetapkan maka mesti dilakukan penetapannya menjadi Perda dalam waktu 3 bulan.

"Jika hingga 4 bulan belum ditetapkan maka akan ditetapkan oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Mahyeldi mengatakan, untuk memenuhi peraturan tersebut, Pemprov bersama DPRD akan mengupayakan seoptimal mungkin pembahasan ranperda RTRW agar bisa segera ditetapkan menjadi Perda. (●)

